



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : DEPARTEMEN JASA PERBANKAN PERIZINAN DAN OPERASIONAL TRESURI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUSSY WANDAYANI
2. Jabatan : KEPALA GRUP
3. NHK : 279782

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **6.389.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/100 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 560.000.000
3. Bangunan Seluas 33 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m2/15 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 364.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/100 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.440.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **670.000.000**

1. MOBIL, HONDA ACCORD/SEDAN Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOBIL, TOYOTA COROLLA CROSS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 560.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **1.736.500.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	1.543.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	535.081.391
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	10.873.581.391
III. HUTANG	Rp.	1.637.320.052
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	9.236.261.339

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.